Peran Komite Audit Dalam *Good Corporate Governance*

Lidia Tambunan

Universitas HKBP Nommensen

liediatambunan@gmail.com

Bonifasius H. Tambunan

Universitas HKBP Nommensen

Bonifasius.tambunan@uhn.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.30596/jrab.v21i1.6618>

ABSTRACT

Overall corporate governance relating to the system and discussion of discussions on the company. The agent has a behavior that tends to side with the stakeholders as a principal that benefits the company. If more and more stakeholders are harmed, the company's reputation will become worse and no one will cooperate with the company. The role of the audit committee on the principle of equality is an important role for parties who are in line with the company so that it is fair to all companies so that no one is harmed. The role of the audit committee is based on the principle of responsibility, which plays an important role in running a good / healthy business, not in its own interests.

Keyword : The Role of the Audit Committee in Good Corporate Governance

Cara Sitasi : Tambunan, L., Tambunan B.H.(2021). Peran Komite Audit Dalam Good Corporate Governance. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, vol 21.(1) hal 119- 128 <https://doi.org/10.30596/jrab.v21i1.6618>

PENDAHULUAN

Pada praktik bisnis yang terjadi, manajemen perusahaan seringkali melakukan berbagai kecurangan yang akhirnya tidak menguntungkan sisi pihak lain yang telah bersedia bekerja sama dengan perusahaan. Pada beberapa kondisi, manajemen perusahaan juga tidak mampu membawa seluruh kepentingan banyak pihak yang berkaitan dengan perusahaan, sehingga pihak yang paling berperan bagi perusahaan adalah pihak yang diperhatikan oleh manajemen perusahaan dengan mengorbankan kepentingan dari pihak yang lain. Manajemen perusahaan yang terus berlaku curang untuk mendatangkan keuntungan, membuat banyak pihak tidak percaya pada perusahaan tersebut. Ketidakpercayaan banyak pihak terhadap perusahaan tidak bisa dibiarkan begitu saja, sebab lambat laun akan menghambat perkembangan bisnis dan ekonomi secara makro. Bila perusahaan tidak mendapat dukungan dari banyak pihak, maka akan banyak perusahaan yang tutup, sehingga banyak pengangguran, daya beli yang merosot dan ekonomi mengalami kemunduran. Untuk mengembalikan kepercayaan tersebut perlu dikembangkan adanya penciptaan *Good Corporate Governance* di perusahaan, sebagai upaya untuk mengelola usaha yang sehat. Menurut Irham Fahmi “*Good Corporate Governance* adalah suatu bentuk keputusan dengan memposisikan perusahaan secara jauh lebih tertata dan terstruktur, dengan mekanisme

pekerjaan yang bersifat mematuhi aturan-aturan bisnis yang telah digariskan serta siap menerima sanksi jika aturan-aturan tersebut dilanggar”.

Penciptaan *Good Corporate Governance* pada praktik yang ada membutuhkan adanya peran dari komite audit. *Good Corporate Governance* tidak akan berhasil diciptakan dan hanya menjadi konsep tertulis saja tanpa adanya tindakan pengawasan yang dilakukan oleh pihak independen terhadap pengelolaan usaha. Tugas komite audit adalah memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi. Terbentuknya komite audit pada perusahaan-perusahaan di banyak negara merupakan ciri dari *Corporate Governance* yang mulai terbentuk dengan baik. Menurut Porter dan Wolmizer dalam Brenda A. Porter menjelaskan bahwa “Munculnya Komite Audit disebabkan oleh adanya kegagalan beberapa perusahaan dan praktek yang salah oleh corporate yang tidak diharapkan sebelumnya”. Komite audit juga berperan dalam mengurangi adanya penyimpangan-penyimpangan dalam perusahaan. Menurut Lawrence “Peranannya adalah mendeteksi adanya beberapa kekeliruan dalam proses pelaporan keuangan dan memonitor hubungan antara manajemen perusahaan dan auditor”. Hal tersebut menunjukkan bahwa Komite Audit memiliki peranan penting dalam mengawasi berbagai aspek organisasi. Eksistensi komite ini terkait erat dengan penegakan *Good Corporate Governance* dan menjadi tolak ukur, apakah perusahaan yang bersangkutan telah melaksanakan *Good Corporate Governance* atau belum. Menurut penjelasan pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN “Komite Audit adalah Komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dan dewan pengawas untuk membantu dewan komisaris dan dewan pengawas yang bertugas menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh satuan pengawas internal maupun auditor eksternal, memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya, memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan segala informasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris dan dewan pengawas serta tugas-tugas dewan pengawas lainnya”.

Komite audit akan memberikan dorongan bagi manajemen perusahaan untuk melakukan pengelolaan usaha yang sehat melalui peran pengawasan yang dilakukan. Komite audit merupakan penghubung antara manajemen perusahaan dengan dewan komisaris, dengan hasil temuan yang dilakukan ketika melakukan peran pengawasan terhadap kegiatan manajemen perusahaan untuk mengembangkan usaha. Adanya fungsi dari komite audit tersebut membuat ada dorongan untuk berusaha memenuhi prinsip-prinsip *good corporate governance*, yang terdiri dari: *fairness*, *responsibility*, *accountability*, dan *transparency*. Peran penting komite audit untuk menciptakan *Good Corporate Governance*, membuat adanya tuntutan untuk mempertahankan independensi komite audit dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan. Komite audit harus independen yaitu tidak dapat dipengaruhi oleh pihak lain dalam menjalankan peran pengawasan. Hal ini dibutuhkan agar temuan dalam tindak pengawasan yang dilakukan oleh komite audit mampu bersifat obyektif dalam arti sesuai dengan kondisi sebenarnya, sehingga terus mendapatkan upaya perbaikan bagi manajemen perusahaan agar selalu mampu menjalankan operasi usaha sesuai dengan tata nilai yang seharusnya berlaku. Komite audit yang independen akan berlaku adil kepada setiap pihak yang berkaitan dengan perusahaan. Karena tidak membawa kepentingan dari pihak manapun tetapi berlaku adil kepada seluruh pihak berkaitan dengan kegiatan pemeriksaan yang dilakukan. Secara kualitatif maupun kuantitatif, pembentukan komite audit dalam perusahaan berperan dalam efektivitas dan efisiensi perusahaan, sehingga membantu perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penerapan praktik-praktik pengelolaan perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) akan menciptakan insentif yang efektif bagi manajemen perusahaan dan penggunaan sumber daya yang efisien,

sehingga mendorong terbentuknya kepercayaan investor, dan masuknya arus modal yang mendorong pulihnya perekonomian, baik secara makro maupun mikro. Peran penting komite audit dalam *Good Corporate Governance* tersebut mendatangkan tuntutan untuk memasukkan komite audit sebagai bagian dari pengembangan usaha.

KAJIAN TEORI

Komite Audit

Menurut Hiro menyatakan bahwa komite audit adalah komite yang bertugas untuk membantu dewan pengawas organisasi dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas tugas auditor eksternal dan auditor internal. Di dalam perusahaan, komite audit sangat berguna untuk menangani masalah-masalah yang membutuhkan integrasi dan koordinasi sehingga dimungkinkan permasalahan-permasalahan yang signifikan atau penting dapat segera teratasi. Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) dalam Ariel Effendi menyatakan bahwa Suatu Komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dan, dengan demikian, tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi Dewan Komisaris (atau Dewan Pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit, dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan. Destiani menyatakan tujuan dibentuknya komite audit oleh dewan komisaris yaitu: Memastikan laporan keuangan yang diterbitkan tidak menyesatkan dan sesuai dengan prakti akuntansi berterima umum, Memastikan bahwa pengendalian internal perusahaan memadai, Menindaklanjuti terhadap adanya dugaan penyimpangan yang sifatnya material di bidang keuangan dan implikasi hukumnya, Merekomendasikan seleksi auditor eksternal. Komite Audit berfungsi untuk membantu Dewan Komisaris menjadi intermediaries atau penghubung antara Dewan Komisaris dan Auditor Eksternal perusahaan publik.

Menurut Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-29/PM/2004 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja Komite Audit poin (3) menyebutkan bahwa persyaratan keanggotaan Komite Audit antara lain, sebagai berikut:

1. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
2. Salah seorang dari anggota Komite Audit memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan.
3. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan.
4. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
5. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau pihak lain yang memberi jasa audit, jasa non audit dan atau jasa konsultasi lain kepada emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh komisaris.
6. Bukan merupakan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan kegiatan emiten atau perusahaan publik, dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh komisaris, kecuali Komisaris Independen.
7. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum maka dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkan kepada pihak lain.

8. Tidak mempunyai :
 - a). Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama emiten atau perusahaan publik ; dan atau
 - b). Hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan usaha emiten atau perusahaan publik.

Pedoman *Good Corporate Governance* memaparkan bahwa peran Komite Audit yaitu:

- a. Mendorong terbentuknya struktur pengawasan intern yang memadai.
- b. Meningkatkan kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan.
- c. Mengkaji ruang lingkup dan ketentuan eksternal audit kewajaran biaya eksternal audit, serta kemandirian dan objektivitas eksternal auditor.
- d. Mempersiapkan surat iuran tugas dan tanggung jawab komite audit selama tahun buku yang sedang diperiksa eksternal audit. Hal ini terkait dengan prinsip pertanggungjawaban (*Responsibility*).

Good Corporate Governance

Good Corporate Governance dari *Calbury Committee* yang berdasarkan pada teori *stakeholder* adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara para pemegang saham, manajer, kreditur, pemerintah, karyawan, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya baik internal maupun eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka. Adrian Cadbury Commite menyatakan *good Corporate Governance* adalah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan agar mencapai antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan, untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan. Hal ini berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik, direktur, manajer, pemegang saham dan sebagainya. Tata kelola perusahaan mewakili “sistem” dimana perusahaan diarahkan dan terkontrol.

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) menyatakan ada beberapa prinsip berkaitan dengan *good corporate governance* yang harus diperhatikan yaitu:

1. Transparansi (*Trasnparency*)
Transparansi diartikan sebagai kewajiban bagi para pengelola perusahaan untuk menjalankan keterbukaan dalam penyampaian informasi sebagai alat pengambilan keputusan.
2. Akuntabilitas (*Accountability*)
Akuntabilitas adalah prinsip dimana para pengelola perusahaan berkewajiban unetuk membina sistem akuntansi yang efektif untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya.
3. Responsibilitas (*Responsibility*)
Responsibilitas adalah prinsip tanggung jawab dimana para pengelola wajib memberikan pertanggungjawaban atas semua tindakan dalam mengelola perusahaan kepada para pemangku kepentingan sebagai wujud kepercayaan yang diberikan kepadanya.
4. Independensi (*Independency*)
Untuk melancarkan pelaksanaan azas *Good Corporate Governance*, perusahaan harus dikelola secara independen yang bersifat profesional, mandiri, serta bebas dari konflik kepentingan dan tekanan dari manapun, sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.
5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Manfaat dalam penerapan *Good Corporate Governance* menurut *Bassel Committee on Banking Supervision* dalam Sari yaitu:

1. Mengurangi *agency cost* yaitu biaya yang timbul karena penyalahgunaan wewenang, ataupun berupa biaya pengawasan yang timbul untuk mencegah timbulnya suatu masalah.
2. Mengurangi *cost of capital*, yaitu biaya modal yang timbul dari manajemen yang baik, yang mampu meminimalisir resiko.
3. Memaksimalkan nilai saham perusahaan, sehingga dapat meningkatkan citra perusahaan dimata publik dalam jangka panjang.
4. Mendorong pengelolaan perbankan secara profesional, transparan, efisien serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian dewan komisaris.
5. Mendorong dewan komisaris, anggota direksi, pemegang saham dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi moral yang tinggi dan keputusan terhadap perundang-undangan yang berlaku.
6. Menjaga *going concern* perusahaan.

METODE

Desain penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang desainnya bersifat umum, fleksibel atau berkembang sesuai dengan situasi dilapangan. Metode ini berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan dilapangan oleh peneliti sebelumnya. Desain penelitian kualitatif biasanya bersifat global tidak terperinci, tidak pasti dan sangat fleksibel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masalah Keagenan Sebagai Pendorong *Good Corporate Governance*

Perusahaan banyak melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk mendapatkan sumber daya tambahan dalam rangka mengembangkan kegiatan usaha yang dimiliki. Perusahaan mendapatkan tambahan modal keuangan dari investor dan kreditor, sumber daya berupa tenaga kerja dari masyarakat dan legalitas dari pemerintah. Kerja sama yang dilakukan perusahaan dengan berbagai pihak mendatangkan adanya hubungan keagenan, yaitu hubungan yang dibentuk di mana ada satu pihak lain yang berposisi sebagai agen dan ada satu pihak lain yang berposisi sebagai prinsipal. Agen merupakan pihak yang diberi kepercayaan serta harus bertanggung jawab kepada prinsipal sebagai pihak yang memberikan tanggung jawab. Manajemen perusahaan adalah pihak agen sedangkan pihak-pihak lain seperti: investor, kreditor, masyarakat dan pemerintah adalah bagian dari prinsipal. Investor dan kreditor memberikan dana yang dimiliki untuk dipertanggungjawabkan oleh manajemen perusahaan berupa adanya pembagian keuntungan berupa dividen kepada investor dan bunga serta pokok pinjaman kepada kreditor. Masyarakat sebagai tenaga kerja memberikan tenaga yang dimiliki untuk mendapatkan gaji dan bonus yang menjadi haknya, sedangkan pemerintah memberikan kepercayaan manajemen perusahaan untuk menjalankan kegiatan operasi usaha dan menuntut pertanggungjawaban adanya pembayaran pajak serta jaminan pemeliharaan lingkungan. Pada praktik tentang hubungan keagenan tersebut, seringkali terjadi masalah di mana manajemen perusahaan tidak mampu mempertanggungjawabkan dengan baik kepercayaan yang diberikan. Manajer perusahaan sering menyajikan pertanggungjawaban yang seakan-akan baik sehingga menguntungkan manajer perusahaan sendiri atau lebih memperhatikan

pihak yang dirasa lebih berperan dalam upaya pengembangan perusahaan dengan mengesampingkan kepentingan dari pihak yang lain. Masalah-masalah yang terjadi dalam hubungan keagenan dikenal dengan istilah masalah keagenan (*agency problem*).

Sulistiyanto dan Warastuti menyatakan *agency problem* adalah permasalahan yang muncul karena manajer perusahaan sebagai pihak agen memiliki perilaku yang cenderung memihak *stakeholders* tertentu sebagai prinsipal yang mampu memberikan keuntungan terbesar bagi mereka. Investor sebagai pihak yang seringkali diutamakan oleh manajer perusahaan sebab pihak investor adalah penyaji dana untuk modal kegiatan bisnis. Agar investor tetap bertahan menanamkan saham pada perusahaan yang bersangkutan maka manajer perusahaan berusaha menjalankan kegiatan operasi usaha yang mampu menghasilkan laba tinggi untuk memberikan dividen tinggi sebagai balas jasa kepada investor meskipun harus melanggar kepentingan pihak lain misalnya masyarakat luas yang terkait dengan perusahaan dengan mengesampingkan tanggung jawab terhadap pemeliharaan lingkungan. Disamping itu, manajer perusahaan sebagai agen juga cenderung bertindak tidak jujur dengan melakukan berbagai kecurangan untuk menunjukkan adanya prestasi yang baik saat melakukan pertanggungjawaban kepada prinsipal agar mendapatkan keuntungan dari tindakan tersebut misalnya berkaitan dengan bonus yang diterima.

Hal ini tidak dapat dibiarkan begitu saja, karena lambat laun akan mengurangi kepercayaan dari pihak *stakeholders* perusahaan yang dirugikan. Bila makin banyak *stakeholders* yang dirugikan maka reputasi perusahaan dalam dunia bisnis menjadi tidak baik dan makin banyak pihak yang enggan melakukan kerja sama dengan perusahaan. Keagenan tersebut pada akhirnya membuat perusahaan tidak memiliki dukungan dalam berbisnis sehingga harus menghentikan kegiatan operasi usaha. Bila makin banyak perusahaan yang menghentikan kegiatan operasi usaha maka akan berdampak pada perekonomian negara, dimana jumlah pengangguran makin banyak, daya beli makin merosot, dan sebagainya. Upaya untuk melakukan tindakan yang mampu melindungi seluruh kepentingan *stakeholders* sangat diperlukan dalam hal ini, dimana *good corporate governance* merupakan salah satu upaya yang dapat digunakan.

Peran Komite Audit Dalam Penciptaan Good Corporate Governance

Keberadaan dari Komite Audit hendaknya dapat dimanfaatkan dengan maksimal dalam rangka penerapan *Good Corporate Governance*, karena Komite Audit mampu memberikan peran yang besar dalam penerapan *Good Corporate Governance*. Komite Audit pada dasarnya mampu mendorong manajemen perusahaan untuk melakukan berbagai pengembangan berkaitan dengan upaya-upaya untuk memenuhi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, membuat cita-cita yang tertulis saja tetapi sungguh-sungguh dapat diwujudkan.

Peran Komite Audit Untuk Menciptakan Good Corporate Governance Melalui Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance

Peran Komite Audit Memenuhi Prinsip Kesetaraan (*Fairness*)

Manajemen perusahaan dalam kegiatan operasional yang dilakukan membutuhkan kerja sama dengan banyak pihak. Dalam rangka menjalin kerja sama yang baik, manajemen perusahaan hendaknya berlaku adil terhadap seluruh pihak yang ada, dimana tidak ada pihak yang lebih dipentingkan atau semua dianggap sama, sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kemampuan untuk berlaku *fair* kepada seluruh pihak yang terlibat

dalam kerja sama membuat manajemen perusahaan terhindar dari tuntutan pihak tertentu yang dirugikan. Pada praktik yang terjadi, umumnya manajemen perusahaan mementingkan pihak tertentu akibat ketergantungan yang besar terhadap pihak tersebut. Hal ini menyebabkan manajemen perusahaan harus mengorbankan kepentingan dari pihak yang lain. Suatu contoh adalah perhatian yang lebih besar kepada investor sebagai pemegang saham membuat manajemen perusahaan berusaha untuk memberikan keuntungan yang besar dengan melakukan manipulasi pajak, sehingga pemerintah menjadi pihak yang dirugikan dan suatu saat akan menuntut perusahaan bila dapat dibuktikan. Hal tersebut bukan merupakan pengelolaan usaha yang sehat atau menyalahi aturan *fairness* sebagai upaya untuk menciptakan *Good Corporate Governance*. Komite Audit memiliki kemampuan untuk memenuhi prinsip kewajaran dimana Komite Audit memiliki kemampuan untuk memberikan dorongan kepada manajemen perusahaan dalam rangka memberikan perlakuan yang wajar atau setara kepada seluruh pihak yang berkaitan dengan perusahaan. Kondisi yang ada mendatangkan kemampuan untuk memperlakukan seluruh pihak *stakeholders* secara adil.

Peran Komite Audit Memenuhi Prinsip Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional dibatasi oleh adanya aturan atau undang-undang yang harus ditaati. Hal ini dimaksudkan agar perusahaan juga melakukan bisnis yang sehat, bukan untuk kepentingan perusahaan sendiri tetapi juga memperhatikan nilai-nilai etika dalam bisnis. Kondisi yang ada membuat adanya prinsip *responsibility* merupakan bagian dari prinsip *Good Corporate Governance*, sebab dalam prinsip *responsibility* diupayakan perusahaan tidak melakukan pelanggaran terhadap aturan atau undang-undang yang berlaku atau mampu memenuhi tanggung jawab sosial yang seharusnya dimiliki. Keberadaan Komite Audit di perusahaan diharapkan mampu mewujudkan hal tersebut, sebab dengan adanya komite audit ada pengawasan bagi operasional bisnis perusahaan yang dilakukan oleh anggota manajemen dengan tujuan untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap aturan atau undang-undang yang berlaku, sehingga perusahaan tidak melakukan pelanggaran terhadap pihak-pihak lain, sesuai dengan aturan atau undang-undang yang berlaku. Hal ini membuktikan bahwa keberadaan Komite Audit mampu menciptakan *Good Corporate Governance* dengan upaya memenuhi prinsip pertanggungjawaban.

Peran Komite Audit Memenuhi Prinsip Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip yang harus dipenuhi untuk menciptakan *Good Corporate Governance*, dimana ada rincian terhadap hak dan kewajiban yang dimiliki oleh manajemen perusahaan dalam rangka mengembangkan bisnis perusahaan. Komite Audit memiliki peran untuk memenuhi prinsip akuntabilitas dalam usaha melakukan pengawasan terhadap proses manajemen risiko dan keberlangsungan fungsi pengawasan di perusahaan. Komite Audit memiliki kekuatan untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan dari auditor internal perusahaan. Hal tersebut membuat Komite Audit memiliki kesempatan untuk melakukan peninjauan terhadap struktur organisasi dan deskripsi kerja masing-masing bagian di perusahaan, beserta dengan sistem pengendalian internal yang sudah dimiliki oleh perusahaan. Hal ini dimaksudkan guna melihat apakah ada kemampuan untuk mengelola risiko terutama yang berkaitan dengan peluang yang akan dimanfaatkan oleh anggota manajemen perusahaan dalam rangka melakukan kecurangan untuk mendatangkan keuntungan bagi pihak itu sendiri.

Manfaat lain dari peran Komite Audit untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan auditor internal adalah kemampuan meninjau anggota manajemen perusahaan yang

harus bertanggung jawab atas kesalahan atau kecurangan yang mendatangkan kerugian bagi perusahaan, sehingga dengan demikian upaya untuk menciptakan kejelasan akuntabilitas di perusahaan semakin jelas dengan keberadaan Komite Audit.

Peran Komite Audit Memenuhi Prinsip Keterbukaan Informasi (*Transparency*)

Pengawasan yang dilakukan oleh Komite Audit merupakan pengawasan menyeluruh tentang hal-hal yang dilakukan oleh dewan direksi dalam menjalankan operasional perusahaan. Pengawasan menyeluruh tersebut bukan hanya pengawasan dalam bidang laporan keuangan saja, tetapi juga perilaku-perilaku yang ada saat menjalankan operasional perusahaan. Tugas Komite Audit tersebut pada akhirnya akan mendatangkan dorongan bagi direksi untuk lebih terbuka terhadap informasi yang dimiliki terutama untuk menyeimbangkan informasi yang akhirnya tidak ada indikasi bagi direksi perusahaan untuk menggunakan informasi lebih yang dimiliki untuk tindak kecurangan. Pengawasan yang dilakukan oleh Komite Audit akan membuat ada banyak informasi yang dilaporkan atau diungkapkan, sehingga sesuai dengan informasi tersebut tidak ada pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan (*stakeholders*) yang dirugikan. Pengelolaan secara sehat untuk meningkatkan nilai yang dimiliki dari *stakeholders* atau penciptaan *Good Corporate Governance* akan dapat dipenuhi oleh adanya fungsi dari Komite Audit tersebut. Keberadaan komite audit di perusahaan diharapkan akan mendorong manajemen perusahaan untuk melakukan proses penelaahan, pemeriksaan dan pengawasan terhadap upaya penyusunan laporan keuangan. Hal tersebut diharapkan juga membuat manajemen perusahaan untuk terbuka dalam penyajian laporan keuangan bahkan informasi-informasi lain yang dipandang penting yang disajikan bersama dengan laporan keuangan.

Peranan komite audit berkaitan dengan *good corporate governance* dapat juga disebabkan oleh kemampuan dari komite audit untuk mengelola risiko. Ali menyatakan bahwa perusahaan memiliki risiko dalam menjalankan kegiatan operasional yang dimiliki. Risiko tersebut hendaknya dapat diminalisasi atau dikelola dengan baik oleh manajemen perusahaan termasuk di dalamnya berbagai risiko yang menyebabkan adanya berbagai kecurangan sehingga menghambat adanya *good corporate governance*. Komite audit akan menjalankan fungsi berkaitan dengan tata kelola dunia usaha yang sehat, sebagai indikator *good corporate governance* melalui kemampuan dari komite audit dalam rangka menjalankan peran sebagai supervisi atau pengawas. Berdasarkan paparan dari Ali tersebut maka komite audit memiliki fungsi penting dengan tindakan pengawasan operasional perusahaan yang dilakukan untuk menghindari atau mengelola risiko usaha yang timbul dengan memberikan dorongan melakukan pengelolaan usaha yang sehat sebagai bentuk dari *good corporate governance*.

KESIMPULAN

Good Corporate Governance dapat diartikan tata kelola perusahaan yang berkonsentrasi untuk keseimbangan antara ekonomi, sosial individu dan masyarakat. Secara keseluruhan *corporate governance* terkait dengan sistem dan mekanisme hubungan yang mengatur insentif pada perusahaan. Pihak agen memiliki perilaku yang cenderung memihak *stakeholders* sebagai prinsipal yang menguntungkan bagi perusahaan. Bila makin banyak *stakeholder* yang dirugikan maka reputasi perusahaan akan menjadi buruk dan tidak akan ada yang mau melakukan kerjasama dengan perusahaan tersebut. Peran komite audit pada prinsip kesetaraan berperan penting pada pihak-pihak yang bekerjasama dengan perusahaan agar berlaku adil pada seluruh perusahaan sehingga tidak ada yang dirugikan. Peran komite audit pada prinsip pertanggungjawaban berperan penting untuk menjalankan bisnis yang baik/sehat, bukan untuk kepentingan sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- A Cadbury, The Corporate Governance Agenda, Journal Of Corporate Governance, Practice-Based Papers, Oktober 2012. h. 7.
- Amelia Elsa, Kiky, Peranan Audit Internal Terhadap Penerapan Good Corporate Governance (studi kasus pada PT. Taspen (persero) KCU MEDAN), Skripsi *SI*, Universitas Negeri Islam Sumatera Utara, 2018.
- Anugerah Rita, Peranan *Good Corporate Governance* Dalam Pencegahan Fraud. Jurnal Akuntansi. Vol. 3 No. 1 Oktober 2014. 101-113.
- Budi Prasetyo, Adrian, Pengaruh Karakteristik Komite Audit Dan Perusahaan Terhadap Kecurangan Pelaporan Keuangan. Jurnal Akuntansi & Auditing. Vol. 11 No. 1 November 2014. 1-24.
- Chrisdianto Bernadinus, Peran Komite Audit Dalam Good Corporate Governance. Jurnal Akuntansi Aktual. Vol. 2 Nomor. 1 Januari 2013. Hlm 1-8.
- Fahmi Irham, Etika Bisnis, Alfabeta, Bandung, 2013.
- Firdausi Mustoffa, Ardian, Peran Komite Audit Internal Dalam Implementasi Good Corporate Governance. Cendikia Akuntansi. Vol. 4 No. 2 Mei 2016.
- Fajriati Maritsa, Pengaruh Peran Komite Audit Dan Audit Internal Terhadap Penerapan Good Corporate Governance. Skripsi *SI*, Universitas Widyatama, 2017.
- Firmansyah Arif, Peranan Komite Audit Mengoptimalkan Fungsi Auditor Internal Dalam Penerapan *Good Corporate Governance* Di PT BNI.tbk. FH. Unisba. Vol. XII No. 1 Maret 2010.
- Gusnardi, Pengaruh Peran Komite Audit Dan *Internal Control* Terhadap Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (studi pada BUMN Terbuka Di Indonesia). Sosiohumaniora. Vol. 10 No. 2 Juli 2008. 58-72.
- Indhira Risma, Peranan Komite Audit Terhadap Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) studi kasus pada PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (persero), Skripsi *SI*, 2007.
- Mohsen Al-Baidhani, Ahmed, The Role Of Audit Commite in Corporate Governance A Descriptive Study, Quartel Journal. Vol. 2 No. 2. April-June 2016.
- Nazir. Moh, Metode Penelitian. Cetakan Kesepuluh, Ghalia Indonesia, Bogor, 2014.
- Nova Sucisari, Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) Pada Pt. BUDI STARCH AND SWEETENERS Tbk Di Kecamatan Labuhan Batu. Skripsi *SI*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2019.
- Nurfajri Rizky, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Peran Komite Audit Dalam Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Menurut Perspektif Internal Auditor (studi empiris pada perbankan syariah di jakarta). Skripsi *SI*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.
- Sari Irmala, Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perbankan Nasional, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.
- Sita Aryanti, Dian, Peran Komite Audit Dan Audit Internal Dalam Perwujudan *Good Corporate Governance* Pada BUMN Yang Sudah Go Public (studi kasus: PT wijaya karya Tbk.). Skripsi *SI*, Universitas Indonesia, 2012.
- Suardi Yudi, Peranan Komite Audit Dalam Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Audit Internal (studi kasus pada PT. Ultrajaya Milk Industri & Trading Company). Skripsi *SI*, Universitas Widyatama, 2009.
- Sukrisno, Agoes, Etika Bisnis Dan Profesi, Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta, 2014.

Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis

Vol 21 No 1, 2021 hal 119 - 128

ISSN 1693-7597 (Print), 2623-2650 (online)

Available online: <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/akuntan>

Sutojo Siswanto, E. John Aldridge, *Good Corporate Governance* (Tata Kelola Perusahaan Yng Sehat), Cetakan Pertama, PT Damar Mulia Pustaka, Jakarta, 2005.

Utama Marta, Komite Audit, *Good Corporate Governance* Dan Pengungkapan Informasi. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia. 2004 Departemen Akuntansi FE UI. Vol 1. PP. 61-79.